

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUCAHYO, M.M

Jabatan : Inspektur Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M

Jabatan : Bupati Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

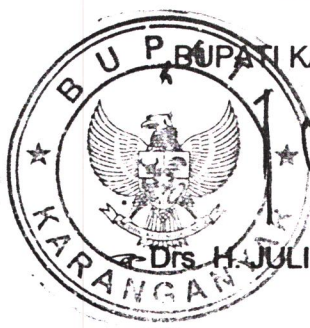
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

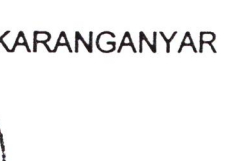
Karanganyar,

2017

Pihak Kedua,

 
Drs. H. JULIYATMONO, M.M

Pihak Pertama,

 
Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. Rahasia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : INSPEKTORAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya infrastruktur pendukung pengawasan.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Terpenuhinya kualitas dan kualitas SDM/aparat pengawasan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah aparat pengawas Inspektorat yang perlu peningkatan profesionalisme	Aparat Pengawas yang profesional dan berkualitas
3.	Tercapainya nilai LAKIP SKPD minimal baik	Pelaksanaan SAKIP yang efektif di seluruh SKPD	Nilai LAKIP BAIK
4.	Terwujudnya kewajaran penyajian LKPD sesuai SAP, efektifitas SAP, Efektifitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan	Tercapainya opini WTP atas LKPD Kab. Karanganyar	Opini WTP
5.	Terlaksananya percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Terciptanya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tidak adanya kasus tindak pidana korupsi

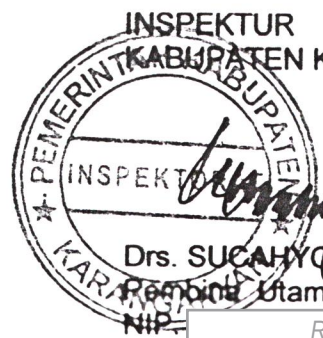
Program

	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	766.040.200	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266.253.000	
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.605.000	
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	192.378.500	
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.513.255.000	
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	263.279.800	
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29.098.500	
8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	13.820.000	



 Drs. H. JULIYAT MONO, M.M.

INSPEKTUR
 KABUPATEN KARANGANYAR



 Drs. SUCAHYO, M.M.

 Kepala Muda

 NIP. Rahasia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS INSPEKTORAT

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100 %
4.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	100%
5.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan kepala daerah.	100%
6.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur terhadap fungsi-fungsi pengawasan	100%
7.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terciptanya kebijakan system dan prosedur pengawasan yang sempurna	100%
8.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya sarana informasi dan keterbukaan public	100%

Program

	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	766.040.200	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	266.253.000	
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.605.000	
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	192.378.500	
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.513.255.000	
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	263.279.800	
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29.098.500	
8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	13.820.000	

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. [Redacted]
Rahasia

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR

[Signature]

SITI ISWARI H, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. [Redacted]
Rahasia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	500 benda pos	100%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	100%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7 unit mobil	100%
4.	Penyediaan alat tulis kantor	1 paket	100%
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	100%
6.	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket, 12 kali retribusi sampah	100%
7.	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	100%
8.	Penyediaan makanan dan minuman	1650 dos	100%
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	100%
10.	Pengadaan mebeleur	1 buah	100%
11.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	100%
12.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 paket pemeliharaan perlengkapan gedung	100%
13.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 LAKIP 2016, 1 LPT 2016	100%
14.	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	12 laporan	100%
15.	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	35 PAK	100%
16.	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	206 LHKPN	100%
17.	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	10200 ASN	100%
18.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	12 bulan	100%

Kegiatan

Anggaran Keterangan

1.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.570.000,00	✓
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	122.400.000,00	✓
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	193.173.000,00	✓
4.	Penyediaan alat tulis kantor	109.515.000,00	✓
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.000.000,00	✓
6.	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.527.000,00	✓
7.	Penyediaan bahan logistik kantor	38.940.000,00	✓
8.	Penyediaan makanan dan minuman	76.875.000,00	✓
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	✓
10.	Pengadaan mebeleur	19.975.000,00	✓
11.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.900.000,00	✓
12.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.216.000,00	✓
13.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.469.000,00	✓
14.	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	91.700.000,00	✓
15.	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	35.062.500,00	✓

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.900.000,00	
12. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.216.000,00	
13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.469.000,00	
14. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	91.700.000,00	
15. Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	35.062.500,00	
16. Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	18.081.000,00	
17. Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	99.603.000,00	
18. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	169.809.500,00	

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR

SITI ISWARI H, SE, MM
Pembina Tingkat I

NIP.

Rahasia

Kepala Sub Bagian Administrasi,
Umum, dan Kepegawaian

RIYASI, S.Sos, MM
Pembina

NIP.

Rahasia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Kepala Sub Bagian Perencanaan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14 buku	100%
2	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	4 kali	100%
3	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	14 LHE LAKIP 2016 dan 1 Rekomendasi	100%
4	Review RKA SKPD	1 LHR SKPD	100%
5	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	144 obrik	100%
6	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	9 LHP	100%
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	23 LHP	100%
8	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	11 SKPD	100%
9	Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan	2 kehadiran	100%
10	Pelaksanaan PKS / Ekspose	11 kegiatan	100%
11	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	1 Dokumen PKPT	100%

Kegiatan

	Anggaran	keterangan
1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.980.000,00	
2 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	13.535.000,00	
3 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	20.971.000,00	
4 Review RKA SKPD	89.217.500,00	
5 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	656.367.000,00	
6 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	25.541.000,00	
7 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	74.585.500,00	
8 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	39.228.500,00	
9 Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan	2.000.000,00	
10 Pelaksanaan PKS / Ekspose	59.725.000,00	
11 Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	26.098.500,00	

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR


SITI ISWARI H. SE, MM
Pembina Tingkat I

NIP. Rahasia

Kepala Sub Bagian
Perencanaan


Dra. Sunarmi, MM
Pembina

NIP. Rahasia

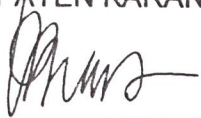
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 unit	100%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	4 buah	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket pemeliharaan peralatan	100%
4.	Review Laporan Keuangan Daerah	1 LHR	100%
5.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	12 kajian	100%
6.	Inventarisasi temuan pengawasan	12 bulan, 1 IHPS	100%
7.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	6 laporan	100%
8.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	3 laporan	100%
9.	Pelaksanaan LARWASDA	1 Kegiatan	100%
10.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	13 Laporan Hasil Monev	100%
11.	Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD	3 bulan pendampingan	100%
12.	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	12 bulan	100%
13.	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	5 SKPD	100%
14.	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	1 paket	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.400.000,00	
2. Pengadaan peralatan gedung kantor	60.000.000,00	
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.350.000,00	
4. Review Laporan Keuangan Daerah	42.431.000,00	
5. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	39.430.000,00	
6. Inventarisasi temuan pengawasan	29.079.500,00	
7. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	325.000.000,00	
8. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	50.000.000,00	

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
9. Pelaksanaan LARWASDA	54.320.000,00	
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	49.750.000,00	
11. Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD	149.397.000,00	
12. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	86.565.000,00	
13. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	26.746.500,00	
14. Pengelolaan/Pemeliharaan Website	49.400.000,00	

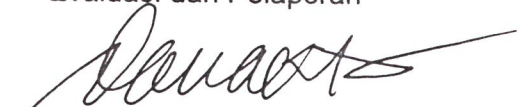
SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR



SITI ISWARI H, SE, MM
Pembina Tingkat I

NIP. Rahasia

Kepala Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan



Sridanarto Latnokusumo, ST, MM
Penata Tingkat I

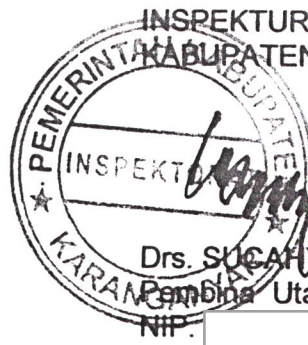
NIP. Rahasia

RENCANA KERJA TAHUNAN

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya infrastruktur pendukung pengawasan.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Terpenuhinya kualitas dan kualitas SDM/aparat pengawasan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah aparat pengawas Inspektorat yang perlu peningkatan profesionalisme	Aparat Pengawas yang profesional dan berkualitas
3.	Tercapainya nilai LAKIP SKPD minimal baik	Pelaksanaan SAKIP yang efektif di seluruh SKPD	Nilai LAKIP BAIK
4.	Terwujudnya kewajaran penyajian LKPD sesuai SAP, efektifitas SAP, Efektifitas SPI dan kepatuhan Terhadap peraturan perundang undangan	Tercapainya opini WTP atas LKPD Kab. Karanganyar	Opini WTP
5.	Terlaksananya percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Terciptanya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tidak adanya kasus tindak pidana korupsi

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. Rahasia

RENCANA KERJA TAHUNAN

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya infrastruktur pendukung pengawasan.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Terpenuhinya kualitas dan kualitas SDM/aparat pengawasan sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah aparat pengawas Inspektorat yang perlu peningkatan profesionalisme	Aparat Pengawas yang profesional dan berkualitas
3.	Tercapainya nilai LAKIP SKPD minimal baik	Pelaksanaan SAKIP yang efektif di seluruh SKPD	Nilai LAKIP BAIK
4.	Terwujudnya kewajaran penyajian LKPD sesuai SAP, efektifitas SAP, Efektifitas SPI dan kepatuahn Terhadap peraturan perundang undangan	Tercapainya opini WTP atas LKPD Kab. Karanganyar	Opini WTP
5.	Terlaksananya percepatan Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Terciptanya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tidak adanya kasus tindak pidana korupsi

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUCAHYO M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. Rahasia



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT

. KH. Samahudi Karanganyar Telp. (0271) 495176, Fax. (0271) 494426

Website : inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail : inspektorat_kra@yahoo.co.id, Kode Pos 57712

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Bupati Diterima Tanggal : 24-1-2017
Nomor : 050/256/24/2017 Nomor Kode :
Tanggal Surat : 23-1-2017 Nomor urut surat : 6
Perihal : Surat Edaran Diteruskan kepada:

DISPOSISI KEPALA INSPEKTUR

B. 123

- Dikirim
- Kembali 84.

24/1/17

Penerima,

- Copy. yg Sek, (Rban & Stukhup
- yg menyebarkan
- asli yg Inspektorat



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 23 Januari 2017

Kepada Yth. :
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar;
di-

KARANGANYAR

SURAT EDARAN
NOMOR : 050 / 256.24 /2017

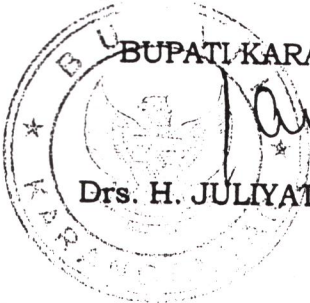
TENTANG
AGENDA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2017

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, maka seluruh jajaran Pemerintah kegiatannya diharapkan menyesuaikan Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian.


 Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar.

AGENDA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017

Lampiran
Surat Edaran Bupati Karanganyar
Nomor : 050/256.24/2017
Tanggal : 23 Januari 2017

[illegible]

No	Kegiatan	Dasar	Des-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17	Jun-17	Jul-17	Agust-17	Sep-17	Okt-17	Nop-17	Des-17	Jan 2018	PELAKS
1	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Pasal 2 Permendagri 54 / 2010															
2	Musrenbang Desa / Kelurahan	Pasal 23 (2) UU 25 / 2004															
3	Musrenbang Kecamatan	Pasal 23 (2) UU 25 / 2004															
4	Forum Koordinasi OPD	Pasal 33 (4) UU 25 / 2004															
5	Musrenbang Kabupaten	Pasal 23 (2) UU 25 / 2004															
6	Forum OPD Provinsi	Pasal 33 (4) UU 25 / 2004															
7	Musrenbang Provinsi	Pasal 23 (2) UU 25 / 2004															
8	Musrenbang Nasional	Pasal 23 (1) UU 25 / 2004															
9	Penyusunan RKPD	Pasal 82 Permendagri 13/2006															
G.	PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN APBD TAHUN 2018																
1	Penyusunan Rancangan KUA - PPAS	Pasal 84 Permendagri 59/2007															
2	Penyerahan Rancangan KUA - PPAS	Pasal 87 Permendagri 59/2007															
3	Pembahasan Rancangan KUA - PPAS	Pasal 87 Permendagri 59/2007															
4	Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS	Pasal 87 Permendagri 59/2007															
5	Pembuatan SE Pedoman Penyusunan RKA-OPD	Pasal 89 Permendagri 59/2007															
6	Penyampaian SE Pedoman Penyusunan RKA-OPD	Pasal 89 Permendagri 59/2007															
7	Pembahasan RKA-OPD oleh TAPD	Pasal 100 Permendagri 59/2007															
8	Penyusunan Raperda APBD dan Raper Kepala Daerah Penjabaran APBD oleh PPKD	Pasal 101 Permendagri 13/2006, Pasal 102 Permendagri 59/2007															
9	Penyampaian Raperda APBD dan Raper Kepala Daerah Penjabaran APBD ke DPRD	Pasal 102 Permendagri 59/2007															
10	Pembahasan dan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan Raper Kepala Daerah Penjabaran APBD antara TAPD dan DPRD	Pasal 105 Permendagri 59/2007															
11	Penetapan Raperda APBD dan Raper Kepala Daerah Penjabaran APBD	Pasal 116 (2) Permendagri 13/2006															

Keterangan :

-  = PENYUSUNAN PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2016
-  = PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017
-  = PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2017
-  = PENYUSUNAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
-  = PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN APBD TAHUN 2018
-  = Batas waktu paling lambat (terakhir)

Karanganyar, 23 Januari 2017

BUPATIKARANGANYAR



Drs. H. JULIATMONO, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT

. KH. Samahudi Karanganyar Telp. (0271) 495176, Fax. (0271) 494426

Website : inspektorat.karanganyarkab.go.id E-mail : inspektorat_kra@yahoo.co.id, Kode Pos 57712

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Setda Diterima Tanggal : 29-8-2017 1.25/1

Nomor : 900/S.177.20 Nomor Kode :

Tanggal Surat : 25-8-2017 Nomor urut surat : 1

Perihal : Surat Edaran Diteruskan kepada:

DISPOSISI KEPALA INSPEKTUR

B. Feb

- Perumahan dan
- Kelapa Kelapa
- Gopk Cendak 87

Ulu / Perenc.
Mas Danang w/ Syura Indriah
Wood bu Rani
→ Review Gopk.

1.25/8



23. Inspekturat ..
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Lawu No.385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039, Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 25 Agustus 2017

Kepada

- Yth : 1. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Inspektur
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian Setda
3. Camat dan Kelurahan

Di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/1.177.20

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENYUSUNAN RKA-SKPD PERUBAHAN DAN DPPA-SKPD
TA. 2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa.

Pasal 154 ayat (2), Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2017, guna memperlancar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD maupun Review RKA - SKPD dan DPPA - SKPD, kami minta saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan RKA - SKPD dan DPPA - SKPD tidak boleh melebihi dari plafon PPAS (Plafon yang sudah dibagikan oleh BAPERLITBANG).
2. Rancangan RKA - SKPD dan DPPA - SKPD dibuat secara rinci sesuai kebutuhan dalam suatu kegiatan dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
3. Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA - SKPD.
4. Pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
5. Untuk melakukan penambahan/ pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA atau tidak perlu dengan menyusun RKA - SKPD baru.

6. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA - SKPD. ✓
7. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya, dalam perubahan APBD tidak perlu diawali dengan menyusun RKA -SKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.
8. DPPA-SKPD dibuat rangkap 2 (dua) setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan benar, dibuat rangkap 9 (sembilan) untuk selanjutnya disahkan oleh TAPD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
9. DPA-SKPD yang mengalami perubahan harus disalin kembali kedalam DPPA-SKPD secara terinci baik obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan, dan pengeseran harus disertai dengan penjelasan dari perbedaan jumlah anggaran baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.
10. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta Saudara untuk segera menyusun dan mengirimkan rancangan RKA – SKPD dan DPPA - SKPD, dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan format lampiran A.XIV.a dan DPPA sesuai dengan format lampiran C.IV.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *dengan menggunakan Aplikasi SIMDA dan mengirimkan kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar dengan export import data dan print out rangkap 2 (dua), yang 1 (satu) dikirim ke Inspektorat untuk direview paling lambat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017.*

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI KARANGANYAR

Sekretaris Daerah



Drs. S. S. M. Si.
Perdana Utama Madya

Rahasia

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Wakil Bupati Karanganyar
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar
4. Arsip.